KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Viral kecurangan TKA SMA, komisi X: evaluasi proses pembelajaran
Tanggal : Selasa, 03 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Viral Kecurangan TKA SMA

Komisi X: Evaluasi Proses Pembelajaran


FOTO: DPR.GO.ID

Ledia Hanifa

SENAYAN menyoroti dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMA atau sederajat. Adanya kasus kecurangan mesti menjadi bahan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan di sekolah.

Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa mengatakan, TKA tidak semestinya hanya dipandang sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan akademik siswa. Yang lebih penting adalah menjadi sarana mengevaluasi kualitas proses pendidikan yang telah berlangsung.

"Jadi TKA semestinya menjadi salah satu alat asesmen (analisis) untuk melihat seberapa optimal kemampuan akademis siswa setelah mengikuti pelajaran di sekolah sepanjang rentang waktu tertentu," ujar Ledia di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Sebelumnya, TKA jenjang SMA/MA/SMK dan sederajat berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Di tengah berlangsungnya TKA, dugaan kecurangan terekam dalam sebuah video viral yang diunggah di akun media sosial X pada Rabu (28/10/26). Video berdurasi 8 detik itu menampilkan seorang siswa merekam suasana di ruang kelas saat mengerjakan TKA di sebuah sekolah di Lamongan, Jawa Timur (Jatim). Padahal, peserta ujian dilarang membawa perangkat komunikasi elektronik ke dalam ruang kelas.

Selanjutnya, di hari yang sama, di akun di X dalam video berdurasi 23 detik, seorang siswa memperlihatkan aksinya memotret soal ujian di layar laptop menggunakan ponsel, lalu mengunggahnya ke *platform* kecerdasan buatan (*artificial intelligence* atau AI) untuk memperoleh jawaban.

Ledia melanjutkan, evaluasi ini tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga mencakup peran guru dan kepala sekolah dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan optimal. Karena evaluasi merupakan bagian yang wajar dalam dunia pendidikan, sehingga tidak semestinya ada upaya manipulasi dalam pelaksanaan asesmen.

Menurutnya, dugaan kecurangan justru perlu menjadi perhatian serius karena dapat mengindikasikan persoalan dalam proses pembelajaran. Utamanya dalam penanaman karakter dan nilai kejujuran kepada peserta didik.

Dia mendorong adanya tanggung jawab pengawas selama pelaksanaan TKA. Pengawas di ruang ujian, termasuk guru dari sekolah lain yang ditugaskan, mesti ebih peka terhadap indikasi kecurangan dan segera mengambil tindakan cepat apabila menemukan dugaan pelanggaran. "Ketidakpedulian pengawas pada gilirannya berkontribusi dalam merusak mental dan karakter siswa," imbuh politisi PKS ini. ■ TIF